

INTERAKSI ANTAR AKTOR DALAM PENYELENGGARAAN EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA

**Muhammad Fitra Akbar Novianto^{1*}, Irfan B², Muhammad Dzul Akram³, Rahmatia⁴,
Siti Shalsabila Ramadani⁵**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar

Email* : fitraakbar336@gmail.com
Makassar, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara berbagai entitas dalam sistem pemerintahan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif serta studi kasus di Kabupaten Berau dan Taman Nasional Kelimutu, penelitian ini mengidentifikasi adanya ketidakadilan kekuasaan di antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, donor internasional, dan masyarakat setempat. Ketidakadilan tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pengurangan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya setempat. Di samping itu, kebijakan terkait konservasi dan pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan dari luar ketimbang kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan memperhatikan nilai-nilai lokal untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang.

Kata kunci : Ekologi, Interaksi Aktor, Subjektivitas Eksternal.

ABSTRACT

This study examines the relationship between various entities in the government system which includes social, economic, political, and cultural aspects in Indonesia. Applying a qualitative approach and case studies in Berau Regency and Kelimutu National Park, this study identifies power injustices among governments, non-governmental organizations, international donors, and local communities. These injustices have an impact on the low involvement of indigenous peoples in natural resource management and reduced recognition of local cultural values. In addition, policies related to conservation and development are more influenced by external interests than the needs of local communities. This research highlights the importance of implementing governance that is more inclusive, participatory, and sensitive to local values to achieve balanced social, economic, and cultural sustainability.

Keywords : Ecology, Interaction of Actors, External Subjectivity.

PENDAHULUAN

Keberagaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, kekayaan ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, tetapi di sisi lain juga menyebabkan eksploitasi dan kerusakan lingkungan yang signifikan (FWI, 2020). Statistik mengenai deforestasi di Indonesia menunjukkan angka yang mencengangkan, seperti pada periode 2014-2015 yang mencapai sekitar 1,09 juta hektar, dan selama 1996-2000 mencapai 3,51 juta hektar setiap tahunnya. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari alih fungsi hutan untuk perkebunan, kegiatan industri ekstraktif, pembakaran lahan, hingga pembangunan infrastruktur (Kementerian Lingkungan Hidup, 2022).

Kerusakan ini juga berkontribusi pada konflik sosial dan ketidakadilan dalam akses sumber daya antara komunitas lokal dan pihak luar seperti perusahaan dan pemerintah (Bailey, 2005). Sebagai langkah untuk mengatasi persoalan ini, berkembang berbagai inisiatif ekologi yang diterapkan dalam beberapa skema, baik yang dipimpin negara (state-led solution) maupun yang berbasis pasar (market based solution) seperti REDD+ (UN-REDD Program, 2011; UN FCCC, 2011). REDD+: Merupakan mekanisme insentif keuangan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan melalui konservasi yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien (Brookfield, 1987) yang di perkuat oleh (Bernstein, 2010; Borrás, 2010) menekankan pentingnya analisis politik ekonomi dalam memahami kegagalan manajemen sumber daya alam yang kompleks, mengaitkan perubahan sosial-ekologi dengan hubungan kekuasaan dan konflik kelas.

Namun, dalam praktiknya, pendekatan-pendekatan ini sering kali tidak selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, dan seringkali berujung pada subordinasi komunitas serta perubahan negatif pada cara hidup mereka (Agung & Wardana, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan literatur review, yang menitikberatkan pada interaksi aktor dalam konteks ekologi administrasi negara melalui dua contoh kasus, yaitu Taman Nasional Kelimutu dan inisiatif REDD+ di Berau. Subjek dalam penelitian ini bukan individu tetapi sumber-sumber literatur yang meliputi jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen penelitian sebelumnya. Alat yang digunakan

dalam penelitian ini adalah lembar analisis dokumen dan kerangka teori politik ekologi untuk mengenali aktor, hubungan kekuasaan, serta dampak dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Langkah-langkah dalam penelitian ini mencakup pengumpulan bahan pustaka, pemilihan sumber, analisis isi, penggabungan temuan, dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan analisis dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian hasil, dan penarikan kesimpulan dalam konteks analisis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekologi administrasi negara merupakan istilah yang membahas mengenai hubungan timbal balik antara sistem administrasi negara dan lingkungan sekitarnya, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam perspektif ekologi ini, sistem administrasi negara tidak berfungsi secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh faktor faktor luar seperti kondisi sosial masyarakat, dinamika politik, nilai-nilai budaya, dan situasi ekonomi yang ada. Interaksi para aktor dalam ekologi administrasi negara melibatkan beragam pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta kelompok kepentingan lainnya yang secara bersamaan saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem administrasi negara. Interaksi tersebut berlangsung di beberapa sektor yaitu Sektor Sosial, Sektor Politik, Sektor Budaya, Sektor Ekonomi.

A. Interaksi Aktor di Sektor Sosial

Dalam sektor sosial, interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan adanya proses negosiasi kepentingan dan ekspektasi. Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan administratif berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat, tetapi seringkali tantangan muncul dari keragaman kepentingan dan representasi masyarakat yang tidak merata. Konflik lokal sosial budaya, terutama di daerah dengan komunitas adat, memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai dan tradisi lokal agar pelayanan publik dapat diterima dan efektif. Contoh Kasus: Taman Nasional Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Penetapan Taman Nasional Kelimutu telah mengubah secara signifikan kehidupan masyarakat setempat, yang sebagian besar terdiri dari komunitas Mosalaki yang sejak lama mengelola sumber daya alam di area tersebut (Batiran et al., 2023). Terjadi relasi kuasa yang tidak seimbang antara Mosalaki sebagai aktor tradisional dan Balai Taman Nasional yang mewakili pihak negara. Masyarakat merasa tersisih dari pengelolaan wilayah adat yang mereka miliki, yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial serta penolakan terhadap kebijakan konservasi yang

dibuat oleh negara tanpa adanya konsultasi yang cukup. Hal ini memicu meningkatnya ketegangan sosial yang berpengaruh terhadap cara pengelolaan sumber daya dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada lingkungan sekitar (Agrawal, 2008)

B. Interaksi Aktor di Sektor Ekonomi

Dalam Sektor ekonomi memperlihatkan interaksi simbiotik dan sekaligus kontradiktif antara pemerintah dengan pelaku usaha. Pemerintah menyediakan regulasi dan fasilitasi, sementara dunia usaha menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi (Bernstein, 2010). Namun, adanya ketegangan kepentingan, khususnya terkait distribusi sumber daya dan perizinan, menimbulkan potensi konflik kepentingan. Koordinasi yang optimal diperlukan agar kebijakan mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meminimalkan dampak sosial-ekonomi negatif. Contoh Kasus: Proyek REDD di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Skema REDD sebagai solusi berbasis pasar lingkungan melibatkan berbagai pihak: pemerintah daerah, lembaga donor internasional, LSM, perusahaan, dan masyarakat setempat. Kekuatan yang tidak seimbang antara aktor donor dan LSM terlihat jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat lokal sering ditempatkan sebagai pihak yang diuntungkan melalui pemberdayaan, namun kenyataannya, mereka terjebak dalam ketergantungan pada bantuan dan pengawasan ketat atas sumber daya yang ada. Situasi ini menyebabkan perubahan dalam cara hidup serta institusi lokal, di mana sebagian masyarakat kehilangan akses tradisional terhadap sumber daya yang sebelumnya mendukung kehidupan mereka, menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi (Nature et al., 2019)

C. Interaksi Aktor di Sektor Politik

Di ranah politik, negara memegang peran dominan sebagai regulator dan pengambil keputusan akhir. Namun, kekuatan aktor non-negara seperti partai politik, LSM, dan kelompok kepentingan juga signifikan dalam proses advokasi dan pengawasan kebijakan publik. Dinamika politik ini sering kali melibatkan relasi kuasa yang asimetris, dimana kepentingan politik kadang mendominasi agenda administratif. Proses dialog dan transparansi kebijakan menjadi kunci untuk mengelola dinamika ini. Contoh Kasus: Politik Bantuan Internasional dan Proyek Lingkungan, Bantuan internasional untuk proyek-proyek konservasi terkadang dipengaruhi oleh kepentingan donor yang ingin menjaga kekuasaan mereka di negara penerima. Dalam proyek REDD di Berau, agenda donor lebih menekankan pada efektivitas pengurangan emisi karbon dan pencitraan kesuksesan di tingkat internasional, sementara kepentingan lokal dan kebutuhan masyarakat adat sering kali diabaikan (Brockhaus et al., 2012). Negara sebagai aktor utama dalam pengaturan regulasi mendukung agenda

donor untuk mempertahankan legitimasi proyek, sehingga mengakibatkan subordinasi terhadap aktor lokal. Hal ini memicu ketegangan politik di tingkat lokal terkait hak dan akses terhadap sumber daya alam.

D. Interaksi Aktor di Sektor Budaya

Sektor budaya menggarisbawahi pentingnya pengakuan nilai dan norma budaya dalam pengelolaan administrasi negara. Kelompok adat dan komunitas budaya lokal memiliki peran strategis dalam mempertahankan identitas sosial dan mengelola sumber daya lokal. Ketidaksesuaian norma budaya dengan kebijakan resmi dapat menimbulkan resistensi dan menurunkan efektivitas administrasi publik. Oleh karena itu, pendekatan inklusif dan berbasis partisipasi budaya sangat diperlukan.

Contoh Kasus: Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Mosalaki di Kelimutu, Mosalaki sebagai pemimpin adat memiliki sistem pengelolaan dan kontrol sosial yang telah diakui secara tradisional. dengan adanya penetapan Taman Nasional, otoritas mereka berkurang, dan sistem pengelolaan adat tergantikan oleh mekanisme birokratis yang kurang mempertimbangkan nilai-nilai budaya. Hal ini menyebabkan adanya penolakan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat adat, serta melemahkan struktur sosial budaya yang ada. Konflik ini mengilustrasikan bagaimana kurangnya integrasi nilai budaya dalam administrasi negara dapat mengakibatkan dampak sosial yang lebih luas (FIELD REDD+, 2011).

E. Keseluruhan Dinamika Interaksi

Kerja sama dan konflik sering terjadi bersamaan dalam interaksi antara aktor. Ketergantungan dan subordinasi kadang-kadang memperkuat ketimpangan kepentingan. Ketidakseimbangan kekuasaan antara negara dan entitas non-negara (seperti LSM dan pemberi dana) dapat mengurangi keterlibatan masyarakat lokal dan tradisi budaya mereka. Perubahan dalam lembaga akibat interaksi antara berbagai aktor mengakibatkan modifikasi cara hidup yang sering kali merugikan masyarakat setempat. Ragam peraturan dan kebijakan berdampak pada seberapa efektifnya administrasi ekologi, terutama dalam konteks proyek-proyek konservasi dan pengembangan yang berkelanjutan. Uraian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana interaksi antar aktor di berbagai sektor administrasi ekologi negara berjalan dan memengaruhi cara hidup masyarakat serta efisiensi administrasi publik.

KESIMPULAN

Interaksi para pelaku dalam ekologi administrasi negara adalah aspek penting dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan publik yang menyeluruh serta berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ekologis menyoroti bahwa sistem administrasi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya di mana ia beroperasi. Kompleksitas interaksi antar aktor membutuhkan strategi pengelolaan hubungan kekuasaan dan kepentingan yang adil, dengan menerapkan prinsip inklusivitas dan partisipasi. Dokumen ini mengusulkan perbaikan dalam mekanisme koordinasi antar berbagai aktor, peningkatan kemampuan komunikasi di antara para pelaku, serta pengintegrasian nilai-nilai budaya dan sosial ke dalam kebijakan administrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas administrasi negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

REFERENSI

- Agrawal, A. (2008). Changing Governance of the World ' s Forests Changing Governance of the World ' s Forests. July. <https://doi.org/10.1126/science.1155369>
- Agung, I. G., & Wardana, M. (2012). A CRITICAL ANALYSIS OF REDD + LEGAL ARCHITECTURE IN REDUCING EMISSIONS FROM FORESTRY SECTORS IN INDONESIAN. 1(April).
- K., Fisher, M. R., Verheijen, B., & Sahide, M. A. K. (2023). Forest and Society Uprooting the Mosalaki : Changing institutions and livelihood impacts at Kelimutu National Park. 7(2). <https://doi.org/10.24259/fs.v7i2.26464>
- Bernstein, H. (2010). Agrarian Questions Then and Now". Borras, J. S. M. (2010). The Politics of Transnational Agrarian Movements. 41(5), 771–803.
- Brockhaus, M., Sunderlin, W. D., & Verchot, L. V. (2012). Analysing REDD + Challenges and choices.
- Brookfield, P. B. and H. (1987). land degradation and society chapter 1.pdf. CIFOR (2015), TNC's initiative within the Berau Forest Carbon Program, East Kalimantan, Indonesia <https://www2.cifor.org/redd-case-book/casereports/indonesia/tncs-initiative-within-berau-forest-carbon-program-east-kalimantan-indonesia/> FIELD REDD+. (2011). REDD-plus. 1–6.
- FWI. (2020). " C ritical note about the loss of natural forests in Indonesia ." April 2018. Kementerian Lingkungan Hidup. (2022). THE STATE OF INDONESIA ' S FORESTS.

Nature, T., Forest, B., & Program, C. (2019). Berau Forest Carbon Program. UN-REDD Program. (2011). UN-REDD Program. 2011.

UN FCCC. (2011). Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session , held in Cancun from 29 November to Part Two : Action taken by the Conference of the Parties at its sixteenth session The Ca. March, 1–31.